

Tantangan Fiskal Indonesia

Disarikan dari beberapa beberapa literatur dan sesi *public lecture*

Evi Noor Afifah

HIDUP ADALAH PERUBAHAN

Dulu



Sekarang



NAMUN PERUBAHAN BUKAN HAL YANG MUDAH

- **Belum terdapat perubahan signifikan** dalam persebaran PDRB Indonesia
- Ketimpangan menjadi **masalah struktural** pembangunan
- Ketimpangan yang berlangsung dalam periode cukup lama berpotensi menimbulkan **dampak sosial**

	1970an	1990an	Terkini
Pulau Jawa % Share PDB Nasional	54	56	(Q3-2023) 57,1
Pulau Sumatra % Share PDB Nasional	29	25	(Q3-2023) 22,2
Agriculture Value added (% , GDP)		21.5	(2022) 12.4
Manufacture Value added (% , GDP)		20	(2002) 18
Service Value Added (% , GDP)		39	(2002) 41

Walaupun sektor primer (pertanian) mengalami penurunan dan sector tersier (*services*) meningkat, **PDB Indonesia masih didominasi Pulau Jawa** dengan rata-rata proporsi lebih dari 50% terhadap PDB nasional.

Megatren Dunia di Tahun 2045

Demografi Global

Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar (Asia 55%). Dengan tren global urbanisasi, arus migrasi, bonus demografi di negara berkembang dan penduduk usia lanjut, terutama negara maju,

Urbanisasi Dunia

Penduduk dunia yang tinggal di perkotaan mencapai 65% dengan 95% penambahan terjadi di *emerging economies*, meningkatnya *megacity*, peranan PDB Kota 70%, pola hidup perkotaan berubah

Peranan *Emerging Economies*

Output negara berkembang 71% dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama sebesar 54%. Peran komoditas berkurang bagi negara berkembang

Perdagangan Internasional

Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6% per tahun.

Keuangan Internasional

Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi *multi currencies*. Aset keuangan *emerging economies* diperkirakan melebihi negara maju. Keuangan digital naik pesat

Kelas Menengah

Jumlah *middle* dan *upper income class* lebih dari 84 persen (8,1 miliar) yang didominasi oleh Asia dan Amerika Latin.

Persaingan Sumber Daya Alam

Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan merebutkan SDA. *Technological advancement* meningkatkan efisiensi eksploitasi SDA.

Teknologi

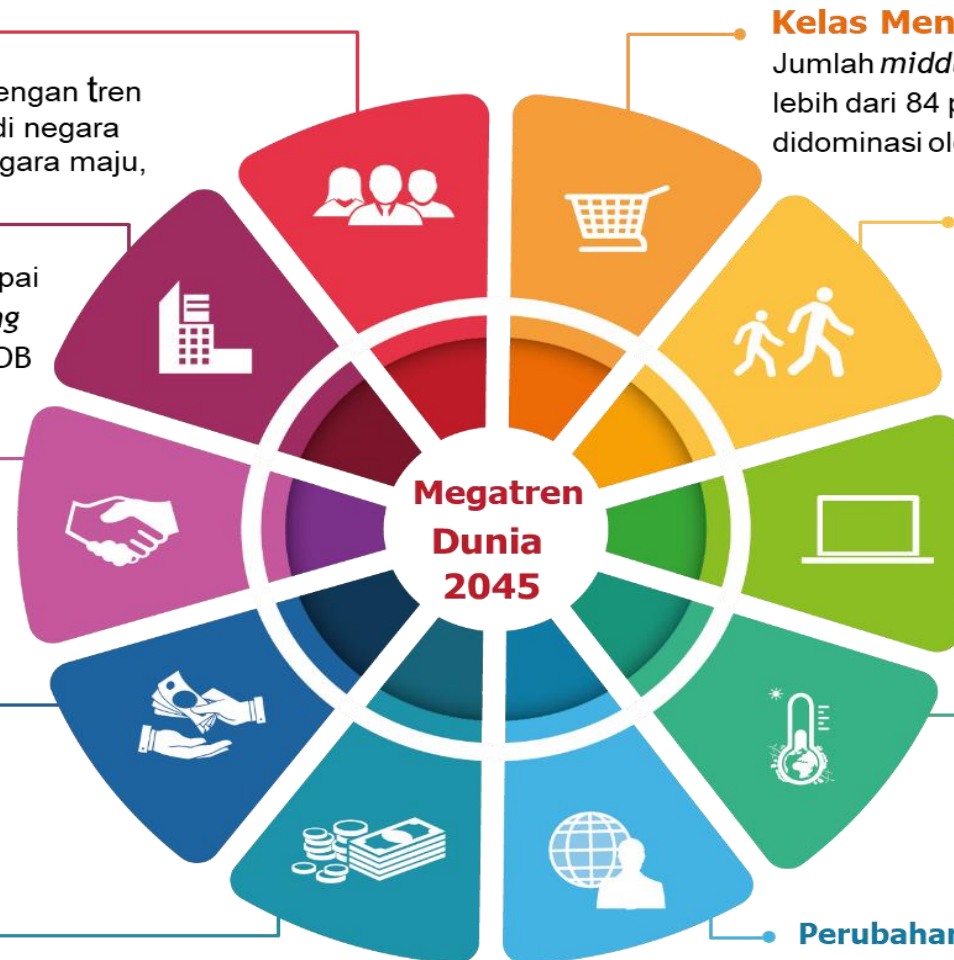
Tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, *wearable devices*, energi terbarukan, otomatisasi, dan *artificial intelligence*. *Digital divide* dan disrupsi teknologi menjadi ancaman

Perubahan Iklim

Tantangan pemanasan global semakin besar (kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang). Suhu global meningkat 3-3,5°C tanpa adanya usaha menurunkan emisi.

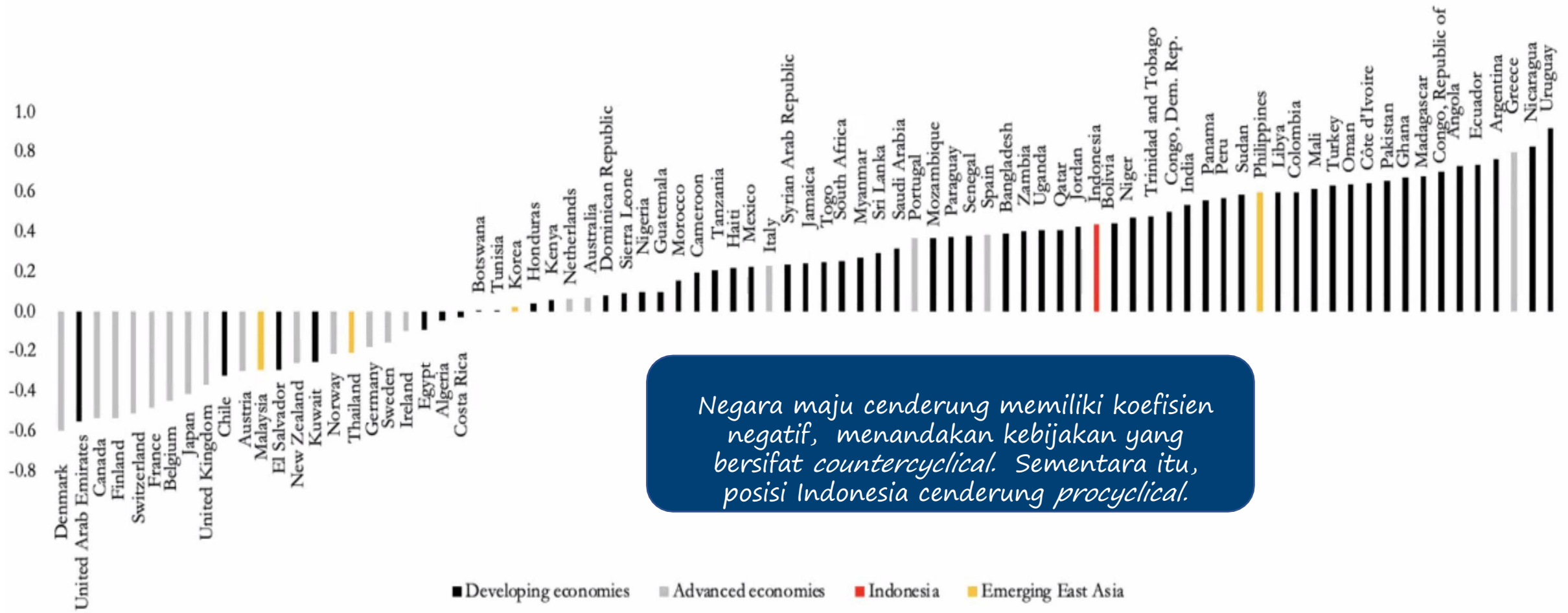
Perubahan Geopolitik

Peningkatan peranan Cina, ketegangan blok Rusia dan AS, kerentanan di kawasan Timur Tengah, semenanjung Korea, Indo Pasifik, termasuk laut Cina selatan serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu



Kebijakan belanja negara di Indonesia juga bersifat *procyclical* dibandingkan negara lain, rentan terhadap gejolak ekonomi global.

Overall Cyclicity pada Belanja Primer (Primary Expenditure) 1980-2018



Negara maju cenderung memiliki koefisien negatif, menandakan kebijakan yang bersifat *countercyclical*. Sementara itu, posisi Indonesia cenderung *procyclical*.

PEMBERDAYAAN FAKTOR EKONOMI

Economic Equality bukan berarti semua harus sama

Setiap komponen perekonomian, memiliki kemampuan untuk
“memperkerjakan sumber daya”

Factor Endowment

- Kepemilikan sumber daya dan kekayaan produktif

Production Possibilities

- Penggunaannya serta ketersediaan akses terhadap **teknologi**

Exchange Conditions

- kemampuan jual beli barang dan menentukan harga

SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU

INDUSTRIALISASI

- Potensi moderasi sektor primer (pertanian, tambang, perkebunan) seiring perubahan struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier
- Penurunan proporsi sektor primer berpotensi diikuti penurunan penyerapan tenaga kerja konvensional sementara perkembangan sektor sekunder dan tertier membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas
- Kompetisi dengan negara-negara lain memunculkan risiko pada arus investasi

DIGITALISASI

- Digitalisasi bukan hanya berarti otomatisasi cara kerja
- Perubahan proses bisnis mendorong efisiensi dan produk/layanan baru yang lebih spesifik
- Artificial intelligence sebagai enabler
Proteksionisme baru di tataran global
- Potensi disrupsi di pasar tenaga kerja dan munculnya bisnis baru

INOVASI .. EFISIENSI



e-Commerce



Media Online



Fin-Tech

KEBIJAKAN MENGELOLA RISIKO DAN POTENSI

Human Capital

Investasi pada sumber daya manusia, melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, juga menjadi prioritas utama.

Infrastructure

Indonesia telah mengembangkan infrastruktur besar-besaran untuk menurunkan biaya logistik dan menyediakan konektivitas yang lebih baik di seluruh wilayah

Institutional

Harmonisasi UU Perpajakan, UU HKPD dan UU Sektor Keuangan untuk memperbaiki regulasi

Kebutuhan mencapai keseimbangan pengelolaan risiko jangka pendek dan jangka Panjang, **sekaligus membangun fundamental**

MENUJU SUATU STANDAR PELAYANAN MINIMUM

diarahkan kepada situasi dimana daerah memiliki

Pemerataan akses dan mutu pelayanan publik

PENDIDIKAN, KESEHATAN, PENGEMBANGAN
DIRI, KESEMPATAN KERJA, SOSIAL, PENSIUN,
JAMINAN HARI TUA

TUMBUHNYA KELAS MENENGAH



- Urbanisasi membuat masyarakat memilih **PERKOTAAN**
 - Perpindahan penduduk ke daerah ekonomi yang lebih tinggi meningkatkan disparitas
 - Daerah dengan penduduk lebih besar akan meminta alokasi sumber daya ekonomi yang besar
 - Aspirasi untuk mencari **KEHIDUPAN LEBIH BAIK**
- **HARAPAN HIDUP** semakin tinggi
- **DAYA BELI** meningkat, peningkatan **SAVING**
- Kebebasan **MEMILIH TEMPAT TINGGAL**

**MUNCUL ASPIRASI:
KEINGINAN UNTUK DI DENGAR**

Middle class: Rising expectation

Pengalaman Chile:

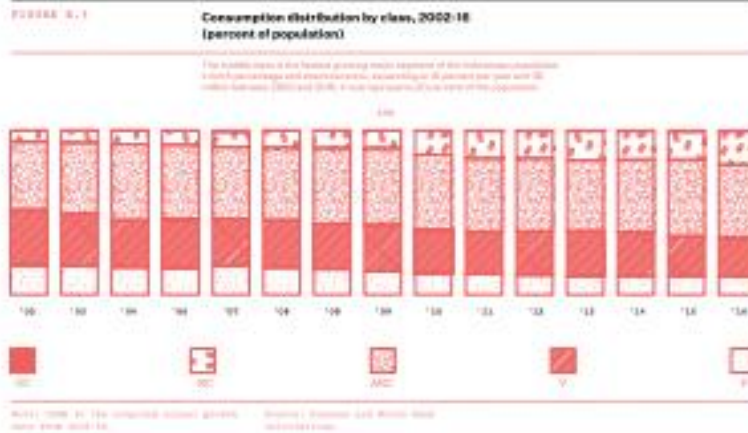
- pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- Penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
- Namun warga Chile merasa ketimpangan meningkat
- 'Keresahan sosial' besar terjadi October 2019

TABLE 2.1 Class definitions (2016 per-capita consumption)

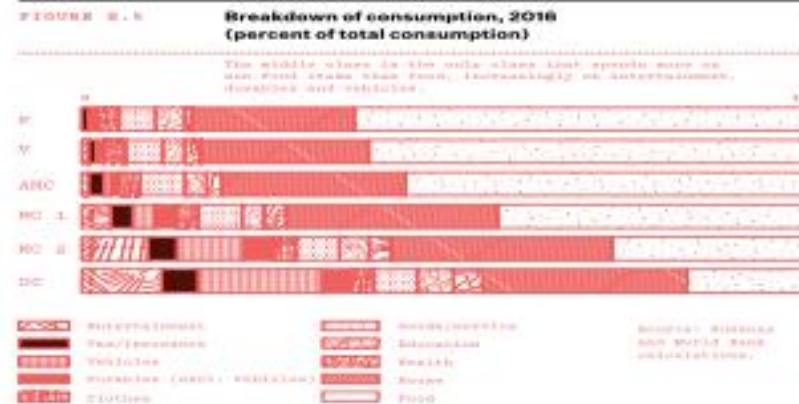
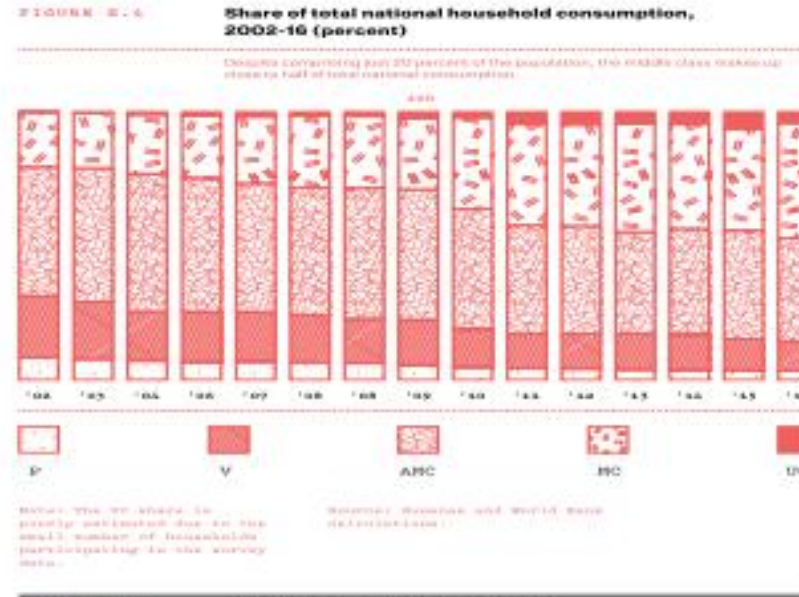
The world's poor comprises those who face a high probability of being poor or vulnerable to falling even when current conditions improve.

Class	P	V	ANC	MC	UC
	Poor	Vulnerable	Aspiring Middle Class	Middle Class	Upper Class
Household income	below national poverty line (PL)	+10 percent chance of being poor next year (10 x PL)	+10 percent chance of being poor but +10 percent chance of being vulnerable (1.4 x PL)	+10 percent chance of being poor or vulnerable (1.5 x PL)	+17x PL
Per-capita consumption (2016 PPP US\$)	Up to 1.94	Up to 2.10	Up to 2.34	Up to 2.50	Up to 4.20
Relative to national PL	0.00-1.00	1.00-1.10	1.10-1.40	1.40-1.50	1.50-17.00

Notes: 1. Only per-capita consumption is included in WBPI, HDI, and SDG indicators. 2. Annual per-capita consumption is based on 2016 data.



Source: World Bank, 2018



APBN merupakan aspirasi dari masyarakat
AKUNTABILITAS perlu tetap dijaga

JANUARI

Perumusan Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional

AGUSTUS

RAPBN (RUU & NK)

FEBRUARI

Resource Envelope

OKTOBER

Pengesahan UU APBN

MARET

Pembahasan dengan DPR tentang Pagu Indikatif

NOVEMBER

Presiden menerbitkan Perpres Rincian Alokasi Anggaran

Penyerahan DIPA

MEI

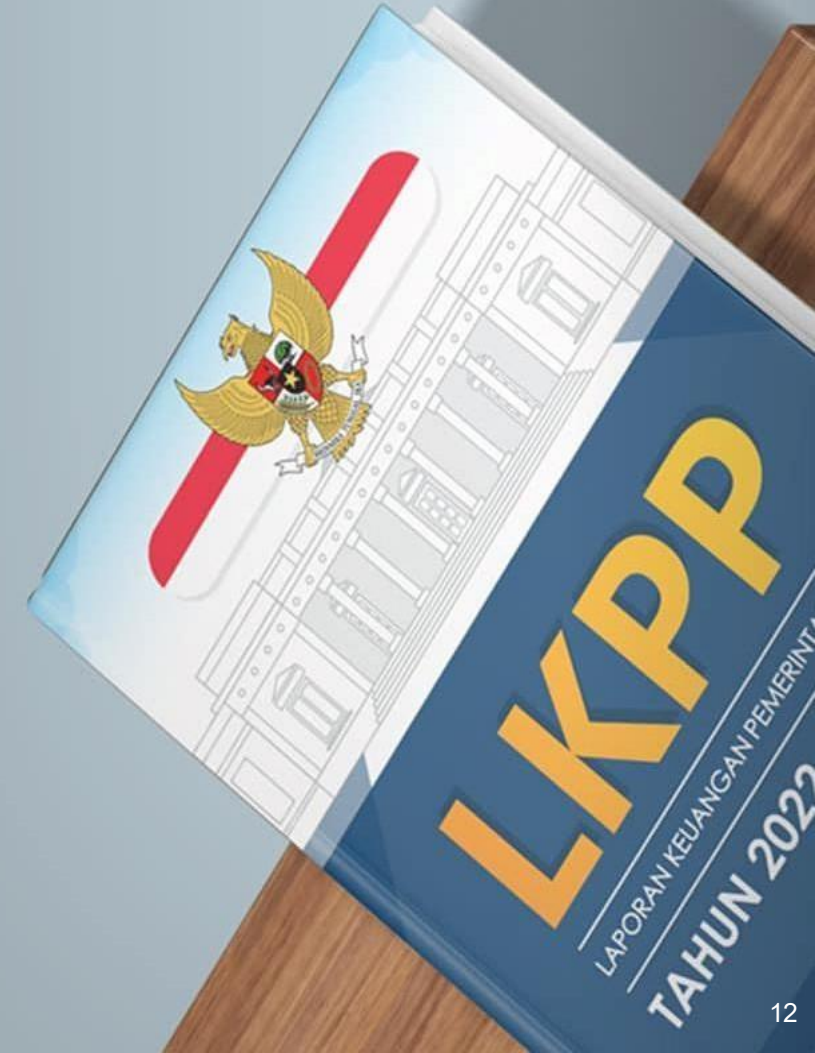
Penyampaian KEM PPKF kepada DPR

JAN - DES

Pelaksanaan APBN

JUNI









Pembahasan dengan DPR tentang Pagu Anggaran



APBN merupakan produk dan alat janji politik

APBN 2024: MENGAKSELERASI PERTUMBUHAN DENGAN MEWASPADAI DINAMIKA KETIDAKPASTIAN GLOBAL

APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang OPTIMIS namun tetap WASPADA terhadap dinamika yang akan terjadi.

	Kemiskinan (%) 6,5-7,5 Rasio Gini 0,374-0,377		PERTUMBUHAN EKONOMI 5,2% (yoy)
	Pengangguran (%) 5,0-5,7		INFLASI 2,8% (yoy)
	Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02		NILAI TUKAR RUPIAH Rp15.000/US\$
	Nilai Tukar Petani 105 - 108 Nilai Tukar Nelayan 107 - 110		SUKU BUNGA SBN 10 TAHUN 6,7%

PENDAPATAN NEGARA

2023: Rp2.637,2 T

2024: Rp2.802,3 T

▲Rp165,0 T

BELANJA NEGARA

2023: Rp3.123,7 T

2024: Rp3.325,1T

▲Rp201,4 T

DEFISIT (% PDB)

2023: Rp486,4 T (2,30%)

2024: Rp522,8 T (2,29%)

	HARGA MINYAK /ICP US\$ 82/barel
---	---

	LIFTING MINYAK 635 ribu bph	LIFTING GAS 1.033 ribu bsm ph
---	---------------------------------------	---

Belanja Prioritas 2024

Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

PENDIDIKAN

Rp665,0 T

- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan (PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, Sertifikasi dan beasiswa)
- Peningkatan sarpras terutama daerah 3T
- Penguatan *link & match* dengan pasar kerja (vokasi & sertifikasi)

PERLINDUNGAN SOSIAL

Rp496,8 T

- Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKH, Kartu Sembako)
- Penguatan perlinsos sepanjang hayat;
- Penguatan graduasi dari kemiskinan a.l program **Sentra Kreasi Atensi** sebagai wadah kegiatan kewirausahaan

INFRASTRUKTUR

Rp423,4 T

- Infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (al. ICT, energi, pangan, konektivitas)
- Penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan

KESEHATAN

Rp187,5 T

- Percepatan penurunan *stunting*
- Peningkatan akses dan mutu layanan
- Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional

IKN

Rp40,6 T

- Akses jalan tol ke IKN
- Pembangunan kawasan inti, Istana, kantor kementerian
- Pembangunan rumah susun ASN, rumah tapak Menteri
- Infrastruktur ketenagalistrikan

KETAHANAN PANGAN

Rp114,3 T

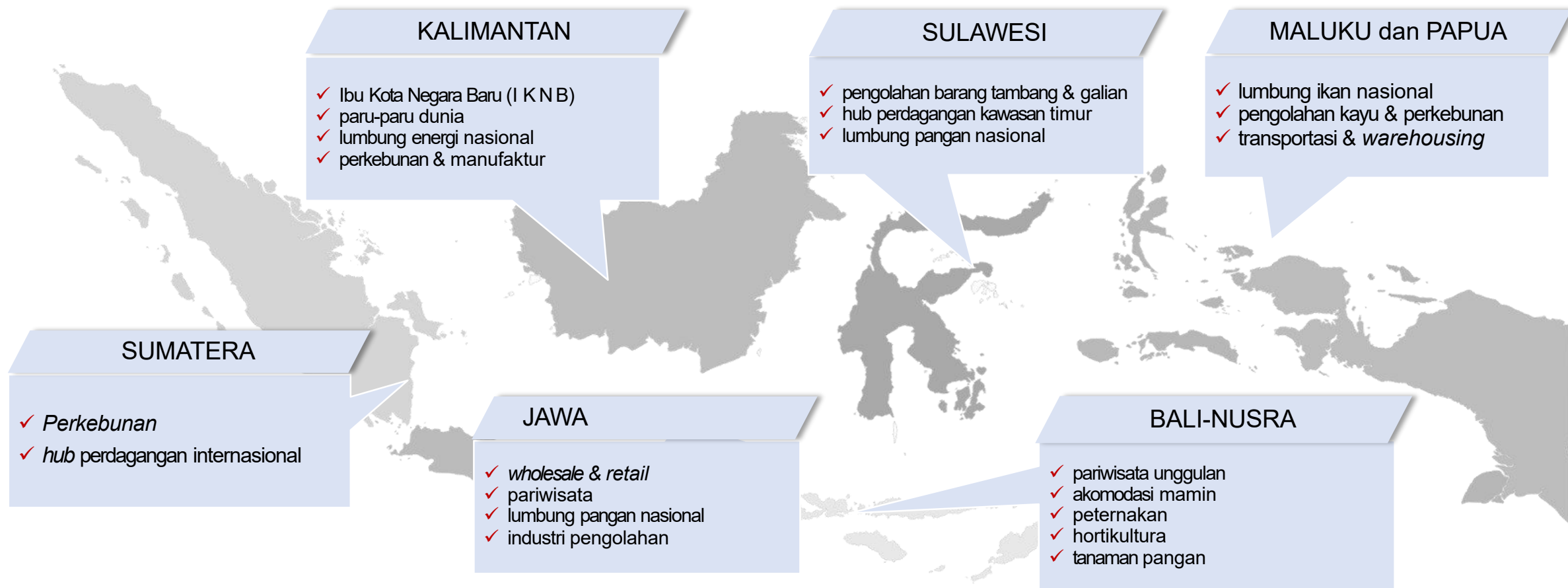
- Peningkatan produksi pangan domestik
- Penguatan cadangan pangan nasional (*availability* dan *affordability* pangan)

HUKUM & HANKAM

Rp331,9 T

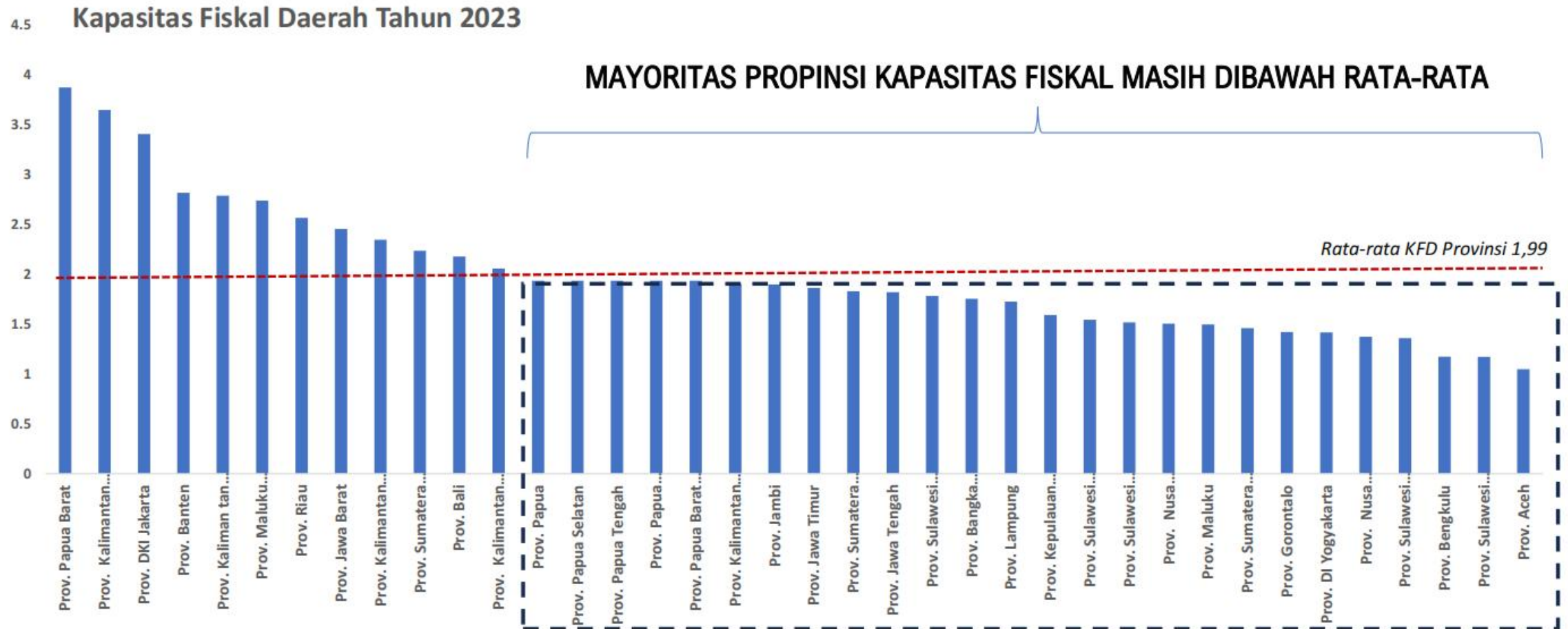
- Pengadaan alutsista, pemeliharaan dan perawatan /almatsus/alpalhankam
- Dukungan pengamanan Pemilu 2024 dan IKN
- Pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam

MENCAPAI POTENSI SELURUH WILAYAH

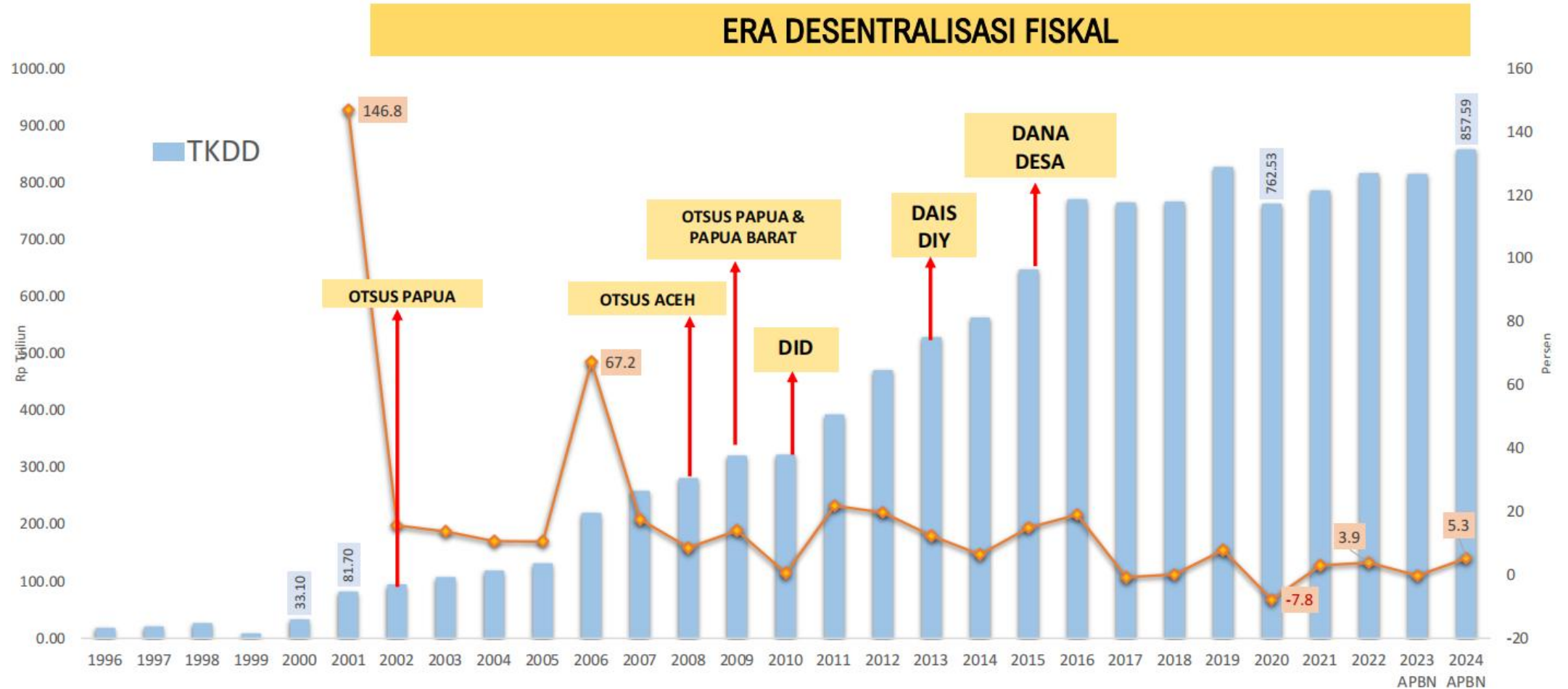


Sumber: RPJMN 2020-2024

TANTANGAN KAPASITAS FISKAL YANG BERBEDA



UPAYA MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH



KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL

Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren kepada Daerah

Fiscal Resources Allocation

*Kemampuan Keuangan Yang Adil
Dan Selaras*

<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal & Pembiayaan</i>
<i>Dana Bagi Hasil</i>	<i>Dana Otsus, Keistimewaan & Dana Desa</i>
<i>Dana Alokasi Umum</i>	

Spending Quality

Belanja Daerah Yang Berkualitas dan Sinergis

<i>Penganggaran</i>	<i>Dana Abadi Daerah</i>
<i>Pengembangan</i>	
<i>Penguatan & Pengawasan</i>	<i>Harmonisasi & Sinergi Fiskal</i>

DANA TRANSFER DAERAH Membantu Mengatasi

Ketimpangan HORIZONTAL DAN VERTIKAL

PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui Undang Undang HKPD

1

KETIMPANGAN
VERTIKAL DAN
HORIZONTAL
YANG
MENURUN

2

PENGUATAN
LOCAL TAXING
POWER

3

PENINGKATAN
KUALITAS
BELANJA
DAERAH

4

HARMONISASI
BELANJA
PUSAT DAN
DAERAH

2

PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH

DBH

- Memerhatikan daerah penghasil/berbatasan/ pengolah serta daerah lain dalam satu provinsi;
- Sinergi DBH *earmarked* (DBH CHT, DR, Sawit);
- Penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif;

DAU

- Sinergi DAU dengan program prioritas nasional;.
- Perbaikan klasterisasi penghitungan DAU,;
- Kebijakan penyaluran DAU berdasarkan kinerja

DAK

- Fokus penurunan *stunting*, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, pembangunan rendah karbon dan transisi energi,

Dana Desa

- Pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa;
- Memperbaiki tata kelola Dana Desa;
- Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional

Insentif Fiskal

- Alokasi kinerja tahun anggaran sebelumnya dan penambahan frekuensi untuk kinerja tahun anggaran berjalan

SINERGI UNTUK PEMBIAYAAN ANGGARAN

Penguatan

Prudentiality

Mengutamakan Prinsip Kehati-hatian

UU HKPD mendorong *creative and sustainable financing*

- Peningkatan kemampuan pendanaan daerah guna akselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya.
- Sinergi pendanaan APBD dan Non APBD
- Selain mendukung pembangunan di daerah, sinergi pendanaan juga akan meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah mengelola proyek skala besar

Perluasan

Skema

Pembiayaan

Konvensional dan Syariah

- Pinjaman Daerah
- Obligasi Daerah
- Sukuk Daerah



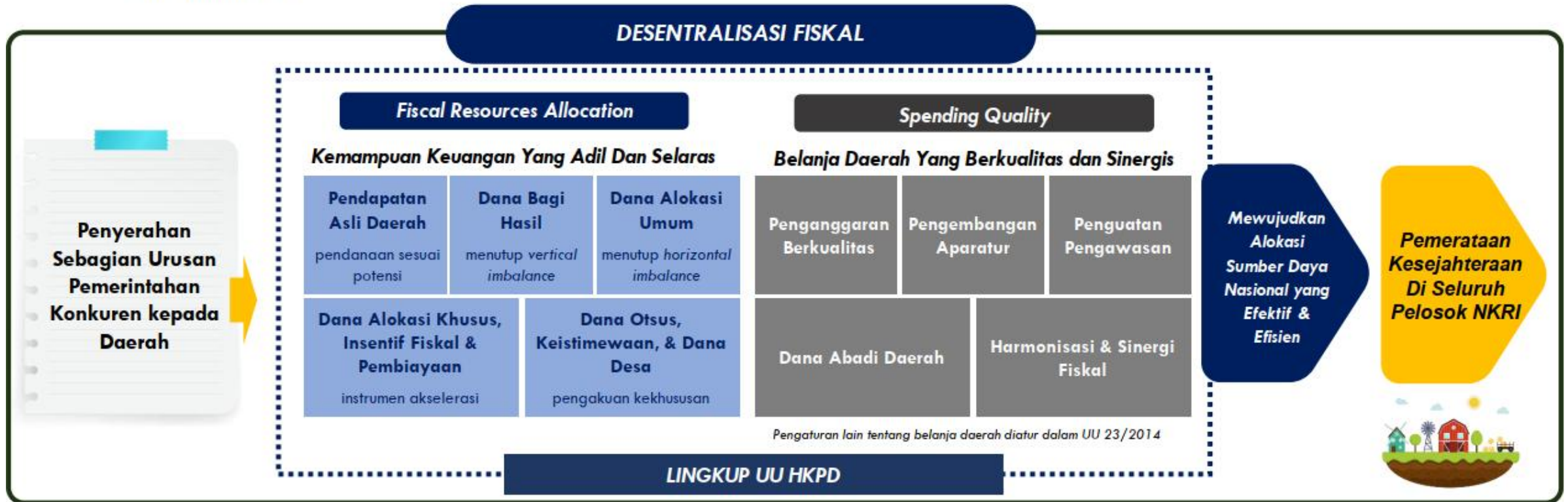
PT Sarana Multi Infrastruktur

Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan

Dapat menjadi **katalisator** percepatan pembangunan infrastruktur melalui akses pembiayaan, investasi dan proyek pemerintah daerah (**konvensional** maupun **Syariah**).

Konsepsi Desentralisasi Fiskal

Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan **alat untuk mencapai tujuan bernegara**, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI



Tantangan Desentralisasi Fiskal

Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan

Pemanfaatan TKDD yang belum optimal

- Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (64,8%)
- Ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satu sumber belanja modal

Struktur belanja daerah yang belum memuaskan

- Program & kegiatan belum fokus (29.623 program dan 263.135 kegiatan)
- Dominasi belanja pegawai (32,4%)
- Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5%)

Local tax ratio masih cukup rendah

Meski penerimaan PDRD mengalami peningkatan namun *local tax ratio* tertekan di angka 1,2% pada tahun 2020 akibat pandemi

Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas

- Pemanfaatan KPBU masih terbatas
- Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah (0.049% PDB) dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB (2000);

Sinergi fiskal pusat - daerah yang belum optimal

Masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, misal KPBU SPAM Umbulan terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat.



BELUM MERATA NYA LAYANAN PUBLIK ANTAR DAERAH

IPM

Capaian Tertinggi

- Kota Yogyakarta (86,61%)

Capaian Terendah

- Kab. Nduga (31,55)

Nasional 71,94

Akses Air Minum Layak

Capaian Tertinggi*

- Kota Magelang (100,00%)

Capaian Terendah

- Kab. Lanny Jaya (1,06%)

Nasional 89,27%

APM SMP/SMA

Capaian Tertinggi

- Kab. Humbang Hasundutan (90,38%)

Capaian Terendah

- Kab. Intan Jaya (13,34%)

Nasional 70,68%

Sumber: BPS (2019-2020)

Anggaran Berkualitas: Anggaran Berbasis Kinerja

- Anggaran berbasis kinerja memiliki 5 elemen utama:
 - Standar Pelayanan Minimal (Permendagri 59/2021)
 - Analisis Standar Belanja → **belum ada pedoman teknis penyusunannya**
 - Indikator kinerja (Permendagri 86/2017)
 - Target Kinerja (Permendagri 86/2017)
 - Standar Satuan Harga (Peraturan Presiden 33/2020)
ASB utk kewajaran suatu kegiatan.
Standar Harga utk kewajaran suatu rincian obyek belanja.
- Merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif di perencanaan dan penganggaran

Serapan anggaran adalah kinerja input

Aspek kualitas dari output

APAKAH SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI SAAT INI DAPAT MENANGKAP PROSES INI?

INPUT DIKELOLA MENJADI OUTPUT

1 Unit Mobil Puskesmas Keliling sesuai standar Kemenkes

UNTUK APA?

PROSES PEMANFAATAN OUTPUT AGAR MENUJU HASIL YANG DIHARAPKAN

- Untuk dipakai jalan²
- Untuk membawa *snack*.
- Untuk melayani orang sakit yg berada di luar jangkauan Puskesmas.
- Untuk ...

UNTUK APA?

MANFAAT/HASIL YANG DIHARAPKAN

Menurunnya angka kesakitan di daerah yang dilayani

UNTUK APA?

DAMPAK

Meningkatnya produktivitas masyarakat (karena tetap bisa bekerja)

CAPAIAN PROGRAM

... jawaban beragam (lebih dari satu)? ... pilih 1 (satu) jawaban yg paling baik (sesuai perUNTUKannya)



Permasalahan

Permendagri 77/2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pedoman monev?

UU 17/2003 ttg
Keuangan Negara
Psl 3 Ayat 1

Keu Negara
dikelolaefisien dan
efektif.....

PP 58/2005 ttg
Pengelolaan Keuda
Psl 130 Ayat 2

Pemberian
pedomantahapan
pemantauan dan
evaluasi

Sudah tidak berlaku

Lalu keluar PP
12/2019 tentang
Pengelolaan Keuda

Tidak ada kalimat
secara eksplisit
tentang monev

Pedoman pengawasan (monev)
pengelolaan keuangan daerah yang
memberikan pedoman untuk mengevaluasi
kinerja pelaksanaan APBD
(**efisiensi dan efektifitas**)

**Definisi efisiensi
dan efektivitas
harus eksplisit**

Catatan

- Anggaran itu syarat perlu untuk pembangunan, namun tidak cukup. Perlu ada belanja berkualitas agar bermanfaat untuk mencapai indikator pembangunan yang semakin baik.
- Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang tangguh adalah kebutuhan
 - Selama ini dianggap bahwa jika sistem informasi sudah ada itu cukup, padahal sebelumnya harus terpenuhi dulu informasi tentang **kerangka logis** dan **data** yang selalu *ter-update*.
- Monev pada level penyerapan dianggap sudah cukup untuk dapat menilai keberhasilan kinerja pembangunan, padahal ini baru kinerja input.
- Perlu untuk mendesain pedoman untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD, utamanya menilai efisiensi dan efektivitas sebagai bagian dari penilaian kualitas anggaran.
 - Ke depan audit rutin yang dilakukan oleh BPK tidak hanya audit terhadap laporan keuangan, namun juga audit kinerja.

Terima kasih